



BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG

#bangga
melayani **BerAKHLAK**
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA TAHUN 2025



[bapendakotabontang](#)



[Bapenda Kota Bontang](#)



Bapenda.bontangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan turunan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya yang berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta merupakan upaya untuk mencapai visi misi Wali Kota Bontang yang sudah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan hingga subkegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025. Diharapkan Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan segenap elemen Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun, apresiasi sebesar-besarnya diberikan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini, sehingga dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat disajikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan semoga apa yang ditargetkan dan termuat dalam Rencana Kerja ini dapat dicapai. Kami harapkan kritik dan saran guna menyempurnakan substansi Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pendapatan Asli Daerah di Kota Bontang.

Bontang, 26 Agustus 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah,


SYAHRUDDIN, S.E., M.A., M.Eng
Pembina (IV/a)
NIP. 19740210 200502 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika dan Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang	18
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.	23
2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3.3 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang Direncanakan.	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025.....	33
BAB V PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian nilai pendapatan asli daerah	7
Tabel 2.2	Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi target kinerja program/kegiatan	8
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah s.d Tahun 2024 Kota Bontang	11
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang	17
Tabel 2.5	Perkembangan Pembayaran dan Tunggakan PBB Tahun 2019-2023	20
Tabel 2.6	Perkembangan Penetapan SKPD dan Tunggakan Pajak Non PBB dan BPHTB Tahun 2021-2023	21
Tabel 2.7	Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang	26
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebuah dokumen resmi menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah Kembali dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Kerja Bapenda merupakan dokumen perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah dalam satu tahun, maka dokumen ini disusun mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Bontang khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang disusun berlandaskan pada :

- 1) Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 38396) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- 9) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 Kota Bontang;
- 10) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor Tahun 2018 Nomor 5);
- 11) Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 50).
- 12) Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bapenda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan sebagai bahan pengendalian kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2025;
3. Merumuskan rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2025.

1.4 Sistematika dan Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Menjelaskan latar belakang penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025.
- 1.2 Landasan Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang dijadikan pedoman penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025.
- 1.4 Sistematika Penulisan



Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU

- 2.1 Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu di Tahun 2023 (n-2) dan perkiraan capaian di tahun berjalan di tahun 2024 (n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan Rencana Strategis Bapenda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bapenda di tahun-tahun sebelumnya. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan renja Bapenda di tahun lalu, menjelaskan realisasi program/kegiatan yang tidak, telah terpenuhi dan melebihi pencapaian target serta menjelaskan faktor-faktor juga kebijakan/tindakan penyebabnya serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, menjelaskan mengenai capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, menjelaskan mengenai tingkat capaian kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bapenda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bapenda.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapenda.



BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan kinerja serta indikator sub kegiatan dilakukan penyesuaian berdasarkan KEPMENDAGRI nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 desember 2021 tentang verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Capaian kinerja Renja Bapenda, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Bapenda. Target kinerja yang dimaksud merupakan sasaran dengan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan/ subkegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan,

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada Tahun Anggaran berjalan yaitu di tahun 2024 dan di tahun-tahun sebelumnya mempunyai 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 8 Kegiatan diantaranya yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan
8. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan berdasarkan capaian renstra (2021 sd 2026) yaitu sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah target kinerja akhir tahun 2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022, 2023 dan target di tahun 2024 yaitu 100 persen sehingga tingkat perkiraan capaian realisasi target renstra pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, hal ini diterangkan bahwa tujuh kegiatan dalam pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah telah terlaksana berdasarkan target yang telah ditentukan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100 persen.



2. Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja persentase capaian pendapatan asli daerah target kinerja akhir tahun 2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022, 2023 telah melebihi dari target yang ditentukan dan target di tahun 2024 yaitu 100 persen sehingga tingkat perkiraan capaian realisasi target renstra pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, hal ini diterangkan bahwa satu kegiatan dalam pencapaian pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah telah terlaksana berdasarkan target yang telah ditentukan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100 persen. Capaian nilai pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian nilai pendapatan asli daerah

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2022	218.309.625.650,00	231.351.605.844,18	105,97%
2023	208.097.914.195,00	264.421.428.875,68	127,07%
2024	245.000.000.000,00		

3. Capaian realisasi target renstra di tahun 2026 dengan tiga puluh tiga sub kegiatan beserta tambahan satu sub kegiatan baru yaitu Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022, 2023 dan 2024 mempunyai nilai capaian dengan persentase yang sangat fluktuatif dimana pada sub kegiatan yang bersifat wajib dan rutin rata-rata realisasi belanja pada tahun 2023 mencapai 93.72 persen, sedangkan pada sub kegiatan teknis yang mendukung kegiatan pelayanan pendapatan asli daerah rata-rata capaian realisasinya adalah sebesar 65,40 persen dimana
4. Terdapat 2 (dua) subkegiatan yang capaian realisasi belanjanya berada dibawah 50 % yaitu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
5. Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi target kinerja program/kegiatan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi target kinerja program/kegiatan

Sub Kegiatan	Persentase Tingkat Capaian Realisasi	Capaian >50%	Keterangan Faktor Penyebab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.89%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	Dilaksanakan pada tahun 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.47%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93,89 %	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	Dilaksanakan pada tahun 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	Dilaksanakan pada tahun 2024
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.49%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.97%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92,24%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.49%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.16%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.32%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00%	<50%	Pengadaan koran/majalah berlangganan tidak dilaksanakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.50%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan

Sub Kegiatan	Persentase Tingkat Capaian Realisasi	Capaian >50%	Keterangan Faktor Penyebab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.89%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Pengadaan Mebel	98.53%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.87%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.52%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.87%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.07	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.73%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.10%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	Dilaksanakan pada tahun 2024
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	84.62%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	78.28%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	94.90%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	54.79%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	4.43%	<50%	Realisasi kegiatan validasi data wajib pajak tidak mencapai target
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	86.27%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan

Sub Kegiatan	Persentase Tingkat Capaian Realisasi	Capaian >50%	Keterangan Faktor Penyebab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.89%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	88.90%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penagihan Pajak Daerah	86.95%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	33.02%	<50%	Realisasi kegiatan pengendalian serta pengawasan kepatuhan wajib pajak tidak mencapai target
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	78.40%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan

6. Implikasi serta kebijakan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab target kinerja yang direncanakan tidak tercapai adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terus menerus terkait pencapaian kinerja keuangan, baik belanja maupun pendapatan, sehingga kinerja keuangan dapat termonitor dengan baik sehingga risiko-risiko yang ada dapat diantisipasi dengan baik.
- Pelaksanaan pemetaan potensi pendapatan yang lebih realistis untuk mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan, dalam hal ini pajak daerah. Karena, trend penerimaan pajak daerah yang cenderung fluktuatif setiap bulannya
- Pelaksanaan pemantauan terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja instansi, dalam hal ini monitoring terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak, penjangkaran terhadap potensi wajib pajak baru, serta kegiatan validasi data wajib pajak

Hasil evaluasi pelaksanaan renja dan capaian renstra Bapenda Kota Bontang disajikan pada tabel 2.3 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis
Badan Pendapatn Daerah s.d Tahun 2024 Kota Bontang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2024)		Petrinaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1				2	3	4	5		6			7		8 = 7/6 x 100%	
														9 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%
xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persn	100	100	Persn	100	100	Persn	100	100%
x	01	2	01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	25	dokumen	10	5	dokumen	6	dokumen	120%	22	400%
x	01	2	01	Penyusunan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	7	dokumen	4	3	dokumen	3	dokumen	100%	10	143%
x	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6	dokumen	2	1	dokumen	1	dokumen	100%	4	67%
x	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6	dokumen	2		dokumen		dokumen		3	50%
x	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	2	1	dokumen	2	dokumen	200%	5	83%
x	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	84	dokumen	43	3	dokumen	3	dokumen	100%	49	119%
x	01	2	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	dokumen	42	41	orang/bulan	41	orang/bulan	100%	126	175%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (ouput) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						8700	eksemplar	1.200	eksemplar	1	dokumen		dokumen	7	8 = 7/6 x 100%	1	dokumen	1.201	dokumen
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%									
x	xx	01	2	06	06	8700	eksemplar	1.200	eksemplar	1	dokumen		dokumen	1	dokumen	1.201	dokumen		14%
x	xx	01	2	06	09	331	kali	88	kali	210	laporan		laporan	120	laporan	418	laporan		126%
x	xx	01	2	07		3	item	3	paket	100	persen		persen	100	persen	203	persen		3333%
x	xx	01	2	07	05	3	item	3	paket	31	unit		unit	1	unit	35	unit		1167%
x	xx	01	2	08		12	Bulan	12	Bulan	100	Persen		Persen	100	Persen	212	Persen		833%
x	xx	01	2	08	01	4500	lembar	1.200	lembar	1	laporan		laporan	1	laporan	1.202	laporan		27%
x	xx	01	2	08	02	12	bulan	24	bulan	12	laporan		laporan	12	laporan	48	laporan		400%
x	xx	01	2	08	04	282	orang	114	orang	53	laporan		laporan	53	laporan	220	laporan		78%
x	xx	01	2	09		12	Bulan	12	Bulan	100	Persen		Persen	100	Persen	212	Persen		833%
							unit	-	unit	13	unit		unit	-	unit	13	unit		-
x	xx	01	2	09	02	33	unit	33	unit	20	unit		unit	34	unit	87	unit		264%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						5	4	3	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%					
x	xx	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	4	dokumen	80%
x	xx	04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan pajak daerah	3	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	4	dokumen	400%
x	xx	04	2	01	15	Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	3	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	laporan	-	laporan	1	laporan	1	laporan	2	laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah. Dasar pembentukan pelaksanaan adalah Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bontang No. 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Bapenda dalam melaksanakan tugasnya di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan, menyelenggarakan fungsi sebagai penyusun kebijakan teknis di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah; pelaksana tugas dukungan teknis di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah; pembinaan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi Bapenda.

Secara tupoksi dan struktur birokrasi dalam sistem pemerintahan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berkorelasi dengan tupoksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Keuangan. Dalam menetapkan programnya, Badan Pendapatan Daerah mengacu kepada program yang ditetapkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Korelasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya terhadap tugas pokok dan fungsi Bapenda sebagai koordinator bidang pendapatan daerah.

Bapenda memiliki indikator tujuan Kategori Kapasitas Fiskal yang diperoleh dengan rumusan dari Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, indikator kinerja utama Bapenda yaitu :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra, disajikan pada tabel, 2.2 sebagai berikut:



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kategori Kapasitas Fiskal (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)	-	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,23%	3,29%	-5,93%	13,59%	3,29%	3,53%	(Realisasi PAD tahun (n) – Realisasi PAD tahun (n-1)) : Realisasi PAD tahun (n-1)
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	80	87	84,7	81	82	Nilai IKM dari penilaian survey dari Pemerintah Kota Bontang terhadap Pelayanan Bapenda



Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa target persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan nilai indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun diproyeksikan terus meningkat. Realisasi capaian IKU 1 (persentase peningkatan PAD) pada tahun 2022 bernilai – (minus) hal ini disebabkan karena Persentase peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun berkenaan dipengaruhi oleh realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

Pada Tahun 2022 realisasi pendapatan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian yang masih dalam tahap penataan kembali pasca covid-19, dimana kondisi ekonomi di Kota Bontang khususnya sudah mulai berkembang dan menunjukkan trend yang positif. Realisasi capaian IKU 1 (persentase peningkatan PAD) pada tahun 2023 juga terus berada pada kondisi yang prima dimana capaian persentase peningkatan PAD adalah sebesar 13,59% dengan nominal capaian pendapatan asli daerah sebesar Rp 262.783.368.861,61 dengan jumlah realisasi pajak daerah sebesar 118.218.692.064,81 atau 44,99% dari jumlah keseluruhan pendapatan asli daerah.

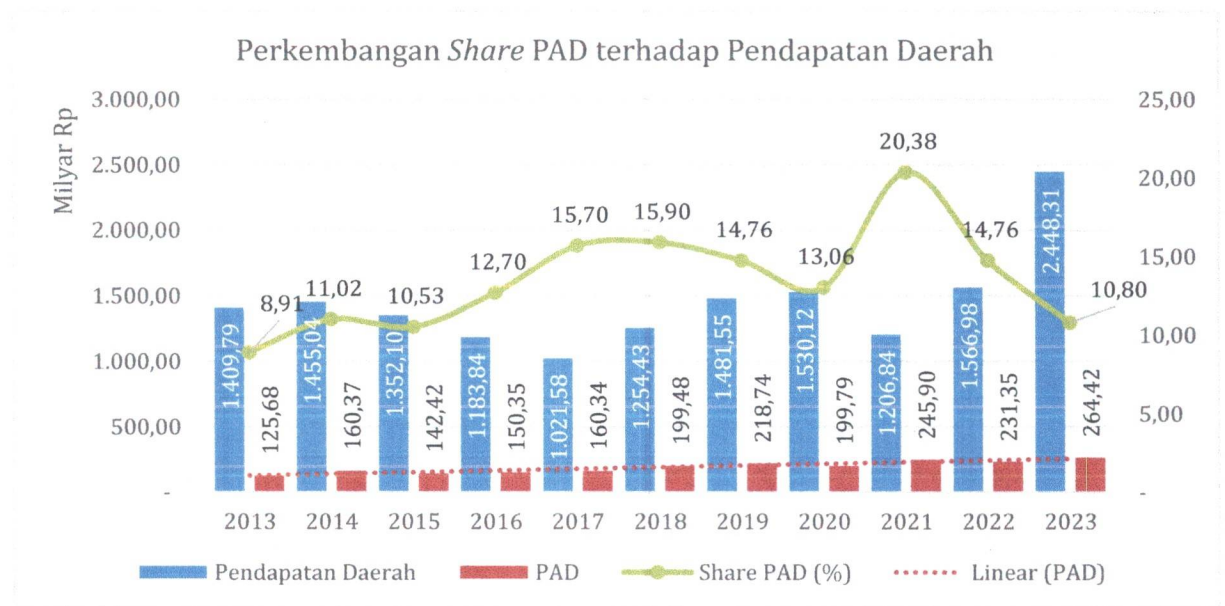
Sedangkan untuk realisasi capaian IKU 2 (nilai IKM) pada tahun 2023 adalah sebesar 84,7 dari target renstra dengan nilai 80, penilaian indeks kepuasan masyarakat tingkat kota belum dilaksanakan sehingga realisasi nilai IKM untuk tahun 2024 belum dapat dijelaskan pada Renja ini.

Untuk proyeksi di tahun 2025 dan 2026 direncanakan terus meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya agar kinerja dari Badan Pendapatan Daerah dapat terus berada pada tingkat yang baik, dan juga sebagai pecutan terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah agar dapat terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Sebagai perangkat daerah yang kinerja utamanya menunjang kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah, Bapenda sejak awal ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dihadapkan pada isu rendahnya Tingkat kemandirian fiskal daerah yang ditandai oleh proporsi PAD terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah masih dibawah 15 persen, bahkan dalam kurun waktu 2013-2023 cenderung mengalami penurunan, meskipun tetap mengalami peningkatan berdasarkan nilai absolut.

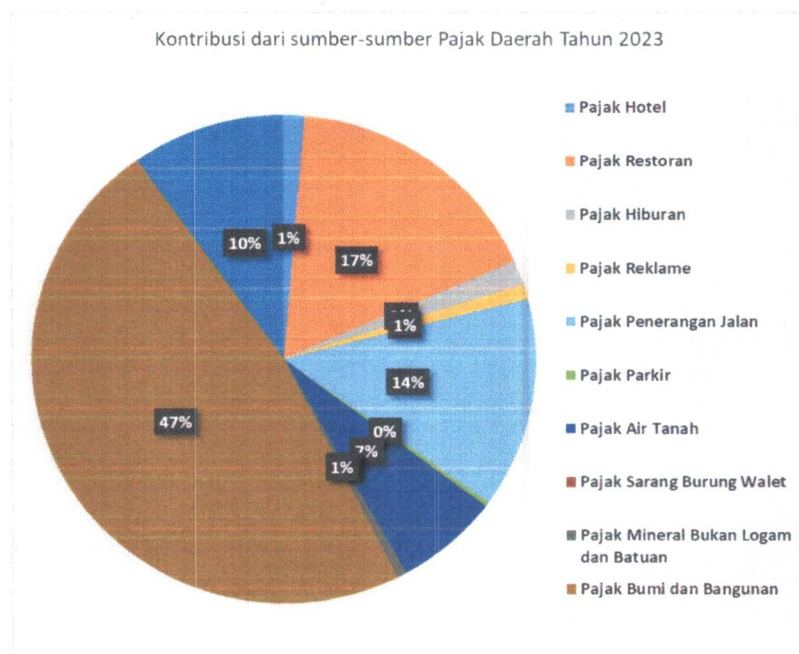




Sejalan dengan isu kemandirian fiskal yang masih rendah tersebut, sebagai perangkat daerah yang secara teknis melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan perpajakan daerah, Bapenda masih dihadapkan pula pada belum optimalnya penerimaan pajak daerah. Meskipun realisasi Pajak daerah menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, namun peningkatan tersebut belum signifikan menopang peningkatan PAD sebagai indikator utama kemandirian pembiayaan Pembangunan daerah.



Realisasi sumber pendapatan dari Pajak Daerah dalam periode 2013-2023 relatif berfluktuasi, namun menunjukkan tren peningkatan. Realisasi penerimaan Pajak Daerah ini bersumber dari 11 (sebelas) sumber jenis pajak yang dihimpun dari wajib pajak, dengan pendapatan terbesar bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dengan kontribusi mencapai 47 persen, Pajak Restoran 17 persen dan Penerangan Jalan 14 persen. Secara keseluruhan distribusi sebelas sumber Pajak Daerah selengkapnya ditampilkan pada gambar berikut:

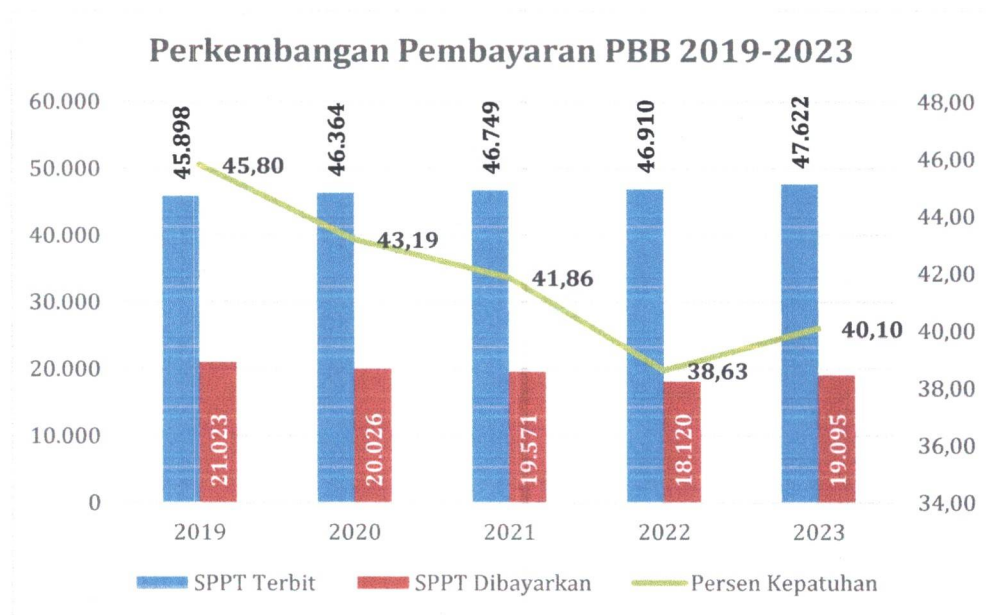


Terlepas dari distribusi dan fluktuasi realisasi penerimaan Pajak Daerah tersebut, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan nilai pajak yang tertunggak dengan jumlah wajib pajak yang menunggak meningkat pula. Secara akumulatif nilai tunggakan yang menjadi piutang PBB hingga tahun 2023 telah mencapai Rp53,4 Milyar. Adapun perkembangan Penetapan, Pembayaran, dan Tunggakan PBB secara tahunan selama lima tahun terakhir 2019-2023 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Pembayaran dan Tunggakan PBB Tahun 2019-2023

Tahun	SPPT Terbit	Nilai Penetapan	Nilai Pembayaran PBB	Nilai Tunggakan PBB	Persen
2019	45.898	42.102.683.121,00	37.001.663.143,00	5.101.019.978,00	12,12
2020	46.364	45.331.166.591,00	37.558.848.481,00	7.772.318.110,00	17,15
2021	46.749	45.219.264.685,00	37.663.565.672,00	7.555.699.013,00	16,71
2022	46.910	45.974.222.644,00	37.636.596.389,00	8.359.924.205,00	18,18
2023	47.622	61.433.754.028,00	53.517.019.995,00	7.916.734.033,00	12,89

Dari perspektif nilai penetapan PBB sesuai SPPT yang diterbitkan, rata-rata nilai tunggakan setiap tahunnya selama tahun 2019-2023 mencapai 15,4 persen dengan tren yang menunjukkan peningkatan. Demikian pula memperhatikan jumlah SPPT dengan kategori menunggak atau tidak dilakukan pembayaran oleh wajib pajak PBB. Jumlahnya juga menunjukkan peningkatan. Dengan membandingkan antara jumlah SPPT yang diterbitkan dengan jumlah SPPT yang dibayarkan oleh WP PBB, maka dapat dilihat tren kepatuhannya menunjukkan penurunan dari 45% pada tahun 2015, menjadi 40 persen pada tahun 2023.



Pada kelompok Pajak Daerah lainnya, permasalahan tunggakan pajak juga menunjukkan peningkatan. Namun demikian secara persentase nilai tunggakannya relatif lebih kecil. Terjadi peningkatan tunggakan pajak-pajak daerah Non PBB dan BPHTB pada tahun 2023 baik pada aspek jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun nilai pajaknya jika dibandingkan realisasi tahun 2022. Hal ini seharusnya menjadi perhatian dan menjadi bahan evaluasi agar peningkatan tunggakan dan selanjutnya menjadi piutang ini tidak berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya sebagaimana terjadi pada objek pajak PBB dan BPHTB.

Tabel 2.6
Perkembangan Penetapan SKPD dan Tunggakan Pajak Non PBB dan BPHTB Tahun 2021-2023

Tahun	Penerbitan SKPD	Nilai Ketetapan SKPD	SKPD Menunggak	Nilai SKPD Menunggak	Persen
2021	6.244	57.552.845.914,10	25	33.817.598,00	0,06
2022	7.592	52.296.428.081,74	75	65.407.527,00	0,13
2023	9.509	50.162.060.190,42	276	591.575.809,00	1,18

Tren meningkatnya tunggakan dan piutang pajak, menjadi salah satu permasalahan prioritas sehubungan dengan isu strategis masih rendahnya kemandirian fiskal Kota Bontang. Oleh karena itu menjadi sangat penting dan strategis bagi Bapenda menyusun strategi dan kebijakan intervensi dengan pendekatan dan terobosan yang tepat agar secara efektif dapat menjadi solusi atas tren peningkatan tunggakan dan piutang pajak daerah ini. Selanjutnya dalam jangka Panjang dapat menjadi stimulasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber untuk menopang kemandirian fiskal daerah.

Sejalan dengan analisis isu strategis diatas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah juga menghadapi isu-isu penting sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai kontribusi pajak daerah terhadap kualitas pembangunan yang dilaksanakan, efek langsung apa yang akan dirasakan masyarakat ketika mereka telah membayar pajak, serta apresiasi sebesar-besarnya terhadap seluruh masyarakat yang dengan taat dan sadar telah membayar pajak.
2. Penguatan dasar hukum atau peraturan yang mendukung langsung pelayanan pajak dan retribusi daerah. Dasar hukum atau peraturan menjadi syarat utama agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan setiap tahunnya, implementasi atas sisdur pemungutan pajak dan retribusi daerah harus dijalankan dengan dasar yang kuat untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang
3. Kerjasama antar instansi yang mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Komponen pendapatan asli daerah yang beragam serta tidak hanya berada pada satu instansi saja membutuhkan kerjasama yang apik antar instansi-intansi tersebut, Badan Pendapatan Daerah berusaha terus menjembatani instansi-instansi lain yang bergerak dibidang pendapatan asli daerah untuk sama-sama memaksimalkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang ada serta terus mempertahankan trend pendapatan asli daerah yang terus naik dengan positif.
4. Pelaksanaan kegiatan validasi data pajak daerah. Selain melakukan upaya pengecekan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data wajib pajak yang valid, Badan Pendapatan Daerah juga melaksanakan upaya validasi data secara besar-besaran dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Pendapatan Daerah memanfaatkan Lidar untuk penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar data yang dihasilkan dapat dijamin keakuratannya.
5. Implementasi program E-BPHTB sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelayanan pajak secara online yang diharapkan dengan adanya program E-BPHTB ini pelayanan pajak daerah dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan lebih transparan. Monitoring terhadap implementasi penggunaan E-BPHTB ini akan terus dilakukan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban administrasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah
6. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pajak daerah. Terbatasnya loket pembayaran serta ruang tunggu antrian pelayanan pajak daerah memaksa Badan Pendapatan Daerah untuk terus melakukan optimalisasi

kegiatan pelayanan dalam kondisi yang terbatas, hal ini tentunya akan menimbulkan risiko berkepanjangan apabila tidak segera ditemukan solusi yang pasti. Akan tetapi Badan Pendapatan Daerah terus melakukan upaya-upaya yang nyata agar masyarakat bisa membayar pajak daerah tanpa harus menguras tenaga, salah satu upayanya adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dimana pembayaran pajak daerah dapat dilakukan dari rumah melalui channel pembayaran yang ada, selain itu Badan Pendapatan Daerah juga melaksanakan kegiatan Jemput Bola langsung kepada masyarakat yang berlokasi di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bontang.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Identifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah anatara lain :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pelaksanaan pengendalian serta pengawasan yang belum berjalan dengan optimal pada tahun 2023 membuat Badan Pendapatan Daerah harus melakukan kegiatan yang sama dengan target serta jangkauan yang lebih luas dengan dukungan anggaran yang tentunya terbatas. Selain itu, kurang adanya keterbukaan dari wajib pajak utamanya yang menjalankan mekanisme *self assessment* terkait omset bulanan/tahunan mereka juga ikut mempengaruhi tingkat capaian realisasi pajak daerah
2. Kurang validnya data yang ada pada database saat ini utamanya data wajib pajak PBBP2. Besarnya jumlah wajib pajak PBBP2 tidak sebanding dengan jumlah petugas lapangan yang ada sehingga kegiatan pengecekan langsung ke lapangan hanya akan dilakukan ketika wajib pajak mengajukan permohonan untuk peninjauan ulang terhadap aset yang mereka miliki. Hal inilah yang menjadi kendala Badan Pendapatan Daerah hingga saat ini.
3. Perumusan potensi pendapatan asli daerah yang kurang realistis sehingga penentuan target pendapatan asli daerah, utamanya pajak daerah masih dirasa kurang maksimal.
4. Realisasi fisik dan belanja Badan Pendapatan Daerah yang masih dibawah target yang ditentukan, pada triwulan II tahun 2024 yang seharusnya target realisasi keuangan dan fisik mencapai 50%, namun realisasi fisik dan keuangan Badan Pendapatan Dearah masih berada pada kisaran angka 40%. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah secara keseluruhan, dimana seharusnya kondisi seperti ini harus dapat diantisipasi agar tidak terjadi.



2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam pencapaian kinerja pada indikator dalam peningkatan PAD, alternatif yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan kajian terkait kebijakan regulasi terbaru.
2. Memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pajak daerah serta melakukan jemput bola langsung ke masyarakat atau wajib pajak
3. Melakukan peningkatan sosialisasi melalui media elektronik maupun masyarakat terkait perpajakan
4. Dilaksanakan validasi atau pemutakhiran data wajib pajak.
5. Mendorong adanya inovasi yang mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah

2.3.3 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang Direncanakan.

Langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis yang membidangi terkait pendapatan asli daerah lainnya dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan terkait pengelolaan pendapatan daerah.
3. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak.
5. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan daerah.
6. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.
7. Melaksanakan pemutakhiran data wajib pajak untuk PBB-P2 dan pajak daerah lainnya.
8. Melaksanakan dan merealisasikan penghapusan piutang pajak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
9. Membuat inovasi dalam pengembangan sistem pelayanan pajak daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:



Tabel 2.7
Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	14.451.042.368	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	23.730.941.979	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	28.374.897	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	30.921.928	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12.977.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.440.040	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.737.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.643.424	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.737.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.643.424	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.922.647	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.195.040	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 Persen	11.437.858.959	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	14 Dokumen	18.384.526.851	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	11.364.806.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	18.308.270.491	



2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	68.091.059	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Laporan	71.463.040
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.961.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.793.320
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 persen	46.404.850	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 persen	303.424.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	46.404.850	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	303.424.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan administrasi perangkatn	100 persen	679.175.845	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan administrasi perangkatn	12 Bulan	1.658.716.218
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.287.325
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	197.088.328
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	69.792.426	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.403.240
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	52.053.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	186.867.993
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.450.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.694.332
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	57 Laporan	437.880.119	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.165.375.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Daerah	100 persen	23.992.083	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Daerah	100 persen	43.326.542



1	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 paket	23.992.083	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	43.326.542
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 persen	2.165.542.029	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 persen	2.539.401.440
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	283.445.971	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.874.096.058	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Laporan	2.229.401.440
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 persen	69.693.705	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 persen	770.625.000
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	39.918.849	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 unit	678.705.000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Bontang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	29.774.856	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit	91.920.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 persen	2.598.583.992	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 persen	4.870.927.099
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	2.598.583.992	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	4.870.927.099
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	200.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	128.628.278



2	Analisa dan Pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	273.740.116	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	378.006.000
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	170.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	200.608.128
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 unit	281.168.205	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	291.027.883
5	Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	417.759.606	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	349.000.400
6	Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJO P nya	18000 objek pajak	500.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJO P nya	23750 objek pajak	2.589.987.534
7	Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	62.622.873	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	99.896.000
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	11 Dokumen	382.758.032	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	1 Dokumen	110.451.000
9	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	32.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	419.467.360
10	Pengendalian, dan Pemeriksaan, dan Pengawasan pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	178.535.160	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	186.365.478
11	Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	117.489.038
					17.049.626.360				TOTAL	28.601.869.078



Berdasarkan tabel 2.3 review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah yaitu dengan 2 (dua) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan pada rancangan awal RKPD pagu indikatif sebesar Rp. 17.049.626.360,- (Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), sedangkan kebutuhan dana sebesar Rp. 28.601.869.078,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Dengan rincian penambahan sebagai berikut :

- a. Penyesuaian jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN
- b. Penyesuaian jumlah belanja wajib bersifat rutin seperti pembayaran listrik, pembayaran internet, pembayaran air, pemeliharaan kendaraan, belanja BBM, pemeliharaan peralatan kantor
- c. Pemeliharaan aplikasi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah
- d. Pelaksanaan kegiatan lanjutan pasca kegiatan pemetaan menggunakan lidar
- e. Pelaksanaan kegiatan validasi data pajak daerah
- f. Pelaksanaan sosialisasi mengenai regulasi pajak daerah, serta mengenai pajak daerah secara khusus
- g. Pelaksanaan kegiatan rutin pelayanan serta penagihan pajak daerah
- h. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pajak daerah
- i. Penyusunan kajian mengenai potensi pendapatan asli daerah
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi petugas pelayanan pajak daerah
- k. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah
- l. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian, kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yang memuat 7 (tujuh) Program Nasional meliputi :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkann ketahanan bencana, perubahan iklim;
- g. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendesain dan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Bapenda Kota Bontang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan memberikan jaminan ketersediaan anggaran melalui realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis

dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah Meningkatnya Kemandirian Fiskal di Daerah. Dengan indikator tujuannya, yaitu “Kategori Kapasitas Fiskal (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)”.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2025 adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda tahun 2025 dan sejalan dengan isu strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab II, dalam Renja tahun 2025 Bapenda melaksanakan inovasi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terkait dengan upaya meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan melalui program BAPENDA MENGAJAR dengan sasaran para pelajar SMA/MA/SMK dan juga menyelenggarakan bimbingan teknis bagi wajib pajak. Inovasi juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpajakan daerah melalui program pelayanan pajak keliling di setiap kelurahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Penyusunan Program /kegiatan/ sub kegiatan dan kinerja serta indikator sub kegiatan telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 desember 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
x	xx	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Persen	Rp23.730.941.979,00	Dana Umum (APBD)		100%	18.524.000.000,00
x	xx	01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kota Bontang	Dokumen	Rp30.921.928,00	Dana Umum (APBD)		19 Dokumen	35.000.000,00
x	xx	01 2 01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Dokumen	Rp13.440.040,00	Dana Umum (APBD)		7 Dokumen	15.000.000,00
x	xx	01 2 01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Bontang	Dokumen	Rp1.643.424,00	Dana Umum (APBD)		6 Dokumen	2.500.000,00
x	xx	01 2 01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Bontang	Dokumen	Rp1.643.424,00	Dana Umum (APBD)		-	2.500.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x xx 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Laporan	Rp14.195.040,00	Dana Umum (APBD)		6 Dokumen	15.000.000,00
x xx 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Kota Bontang	Dokumen	Rp18.384.526.851,00	Dana Umum (APBD)		78 Dokumen	15.076.000.000,00
x xx 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Orang/Bulan	Rp18.308.270.491,00	Dana Umum (APBD)		72 Dokumen	15.000.000.000,00
x xx 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Laporan	Rp71.463.040,00	Dana Umum (APBD)		6 Laporan	70.000.000,00
x xx 01 2 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	Dokumen	Rp4.793.320,00	Dana Umum (APBD)		-	6.000.000,00
x xx 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bontang	Persen	Rp303.424.000,00	Dana Umum (APBD)		1	50.000.000,00
x xx 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang	Orang	Rp303.424.000,00	Dana Umum (APBD)		49 Orang	50.000.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana
x	xx	01	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Bontang	Persen	Rp1.658.716.218,00	Dana Umum (APBD)	1	782.000.000,00			
				06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	Rp24.287.325,00	Dana Umum (APBD)	4 Item	15.000.000,00		
													01	
x	xx	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	Rp197.088.328,00	Dana Umum (APBD)	9 Jenis	120.000.000,00	
x	xx	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	Rp75.403.240,00	Dana Umum (APBD)	10 Item	75.000.000,00	
x	xx	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	Rp186.867.993,00	Dana Umum (APBD)	7 Item	60.000.000,00	
x	xx	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bontang	Dokumen	Rp9.694.332,00	Dana Umum (APBD)	8700 Eksemplar	12.000.000,00	
x	xx	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Laporan	Rp1.165.375.000,00	Dana Umum (APBD)	331 Kali	500.000.000,00	



Kode					Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
x	xx	01	2	07	2	3	4	5	6	7	8	10
x	xx	01	2	08	05	3	4	5	6	7	8	10
x	xx	01	2	09	02	3	4	5	6	7	8	10



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, dan Sub Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
x	xx	01	02	09			06	Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
	1				2	3		4	5	6	7	8	9	10
x		xx	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Unit	Rp91.920.000,00	Dana Umum (APBD)		5 Jenis	42.000.000,00
x		xx	04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bontang	Persen	Rp4.870.927.099,00	Dana Umum (APBD)		100%	2.920.000.000,00
x		xx	04	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bontang	Persen	Rp4.870.927.099,00	Dana Umum (APBD)		100%	2.920.000.000,00
x		xx	04	2	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang	Dokumen	Rp128.628.278,00	Dana Umum (APBD)		5 Dokumen	250.000.000,00
x		xx	04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bontang	Dokumen	Rp378.006.000,00	Dana Umum (APBD)		15 Dokumen	300.000.000,00
x		xx	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang	Laporan	Rp200.608.128,00	Dana Umum (APBD)		7 Laporan	200.000.000,00
x		xx	04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang	Unit	Rp291.027.883,00	Dana Umum (APBD)		6 Sarana dan Prasarana	300.000.000,00



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud dan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja merupakan bagian tahapan dalam pelaksanaan suatu perencanaan dimana tujuan akhir yang diharapkan adalah adanya pedoman dan acuan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian semoga dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah ini dapat menjadi acuan demi tercapainya tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.